

Tinjauan Mata Kuliah

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan mata kuliah yang mempelajari hukum perlindungan konsumen secara komprehensif. Hukum perlindungan konsumen tidak hanya dilihat dari segi kaidah-kaidah atau norma-norma hukum perlindungan konsumen saja, tetapi juga dipelajari mengenai lembaga-lembaga dalam hukum perlindungan konsumen serta proses dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Dengan mempelajari hukum perlindungan konsumen ini, maka Anda diharapkan akan mampu memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen itu berlaku, serta dapat berlatih mengimplementasikan pengetahuan Anda dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang perlindungan konsumen.

Keseluruhan isi buku materi pokok Hukum Perlindungan Konsumen ini dikemas dalam 9 modul, yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

Modul 1 membahas mengenai hukum perlindungan konsumen yang meliputi pengertian hukum, pengertian hukum perlindungan konsumen, dan sejarah perlindungan konsumen baik di dunia maupun di Indonesia. Selain itu juga pada Modul 1 ini dibahas mengenai pengaturan perlindungan konsumen, yang terdiri dari sumber-sumber hukum perlindungan konsumen, asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen.

Modul 2 membahas secara khusus mengenai konsumen. Pada modul ini dibahas mengenai pokok-pokok konsumen yang di dalamnya membahas istilah dan pengertian konsumen dan prinsip-prinsip konsumen. Selain itu, juga dibahas mengenai hak dan kewajiban konsumen.

Modul 3 membahas secara khusus mengenai pelaku usaha. Dalam modul ini dibahas mengenai pokok-pokok tentang pelaku usaha yang pembahasannya meliputi pengertian, hak dan kewajiban dan prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Selanjutnya dibahas juga mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UUPK. Dalam pembahasan mengenai larangan bagi

pelaku usaha pembahasannya terkait dengan produksi, iklan dan klausula baku. Selain itu juga di bahas tentang tanggung jawab pelaku usaha.

Modul 4 dibahas mengenai peraturan yang terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya yang berhubungan dengan produk barang dan/jasa. Peraturan perlindungan konsumen dalam hal produk barang dibahas yang berkaitan dengan peraturan di bidang pangan dan non-pangan (elektronik). Selanjutnya perlindungan yang terkait dengan peraturan di bidang jasa dibahas tentang pengaturan perlindungan konsumen di bidang jasa kesehatan dan periklanan.

Modul 5 secara detail membahas tentang aspek hukum publik dalam hukum perlindungan konsumen, dalam hal ini aspek hukum pidana dan HAN.

Selanjutnya pada Modul 6 dibahas mengenai aspek hukum perdata dalam hukum perlindungan konsumen, yakni hubungan hukum dan pelaku usaha berdasarkan perjanjian dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Modul 7 membahas mengenai pembinaan, pengawasan dan badan/ lembaga penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembahasan lebih detail membahas mengenai pembinaan perlindungan konsumen dan pengawasan perlindungan konsumen. Selanjutnya dibahas pula mengenai kedudukan, peran dan fungsi badan/ lembaga dalam perlindungan konsumen, yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Modul 8 membahas mengenai penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dalam modul ini secara detail mengenai sengketa konsumen, pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran UUPK dan jenis-jenis penyelesaian sengketa konsumen. Selanjutnya di modul ini dibahas pula bagaimana prosedur penyelesaian di luar pengadilan yang terdiri dari

penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan melalui BPSK. Sedangkan untuk memperdalam pemahaman mengenai penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka diketengahkan pula pembahasan atas contoh-contoh kasus penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Modul 9 membahas mengenai penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan. Dalam modul ini dibahas secara detail mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan konsumen di pengadilan, jenis-jenis gugatan konsumen yang dapat diajukan di pengadilan. Selanjutnya dibahas mengenai prosedur penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, baik yang diajukan oleh individu maupun oleh sekelompok konsumen, LPKSM dan Pemerintah. Untuk lebih memperdalam pemahaman penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, maka diberikan pula pembahasan contoh-contoh kasus penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan.

Selamat belajar, semoga sukses.

PETA KOMPETENSI HKUM4312/HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN/3SKS 1-9

